

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Secara keseluruhan profesionalisme birokrasi Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandarlampung dalam merespon aspirasi publik, melakukan kreativitas pelayanan, dan melakukan inovasi kurang baik dan belum merefleksikan harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan secara prima dalam pengelolaan sampah. Hal ini dikarenakan faktor masih minimnya sarana dan prasarana yang ada, kebijakan yang belum terimplementasikan dengan baik, serta orientasi kerja aparatur pegawai yang hanya bersifat formalitas.
2. Profesionalisme organisasi pada Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandarlampung lebih digerakan oleh peraturan yang ada daripada oleh misi yang telah dibuat. Struktur yang ada saat ini belum kondusif dan membuat keadaan dimana bawahan lebih menjadi pelaksana perintah atasan daripada menjadi bagian dalam meningkatkan profesionalisme organisasi. Dari aspek kepemimpinan lebih memperlihatkan penempatan diri sebagai pengawal peraturan daripada menempatkan diri sebagai katalisator yang visioner dalam memberikan ruang kepada bawahan untuk lebih kreatif, responsif dan melahirkan inovasi-inovasi baru dalam menjalankan profesionalisme kerja.

3. Sistem *reward and punishment* belum dijalankan dengan baik, akibatnya sikap responsif, kreatif, dan inovatif dari para aparatur pegawai belum berkembang dengan baik, hal ini memberikan dampak pada profesionalitas kinerja para pegawai.

B. Saran

1. Perlunya kemandirian (otonomi) bagi Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandarlampung dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai berdasarkan visi dan misi yang telah dibuat. Peran Pemerintah Daerah lebih sekedar mengarahkan saja dan proses pencapaian tujuan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandarlampung sebagai *leading sector*nya.
2. Perlunya pemimpin yang berjiwa *entrepreneur* dan tanggap terhadap aspirasi publik dan perubahan lingkungan, hal ini dapat dilakukan dengan menawarkan kepada publik jabatan tersebut dengan memunculkan gagasan-gagasan atau program-program yang berorientasi kepada masyarakat dan dipilih melalui suatu proses kelayakan dan kecocokan (*fit and proper test*) oleh DPRD setempat.
3. Perlunya menetapkan dan menentukan standar mutu pelayanan yang aspiratif, responsif inovatif, dan fleksibel, dengan konsekuensi birokrasi harus mematuhi standar mutu pelayanan tersebut secara konsisten. Pelanggaran atas standar mutu harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat melalui pemberian ganti-rugi seperti pembebasan biaya pelayanan.

4. Pentingnya peningkatan kualitas sumber daya birokrasi Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandarlampung untuk mensikapi kemandirian instansi yang akan memudahkan mereka untuk mengantisipasi segala perubahan dalam bidang teknologi dan diversifikasi aspirasi serta tuntutan publik dalam meningkatkan profesionalisme kinerjanya.